



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 3923 / K.1 / PDP.09
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Status Akreditasi
BPSDM Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2021

Jakarta, 6 Agustus 2021

Yth. Gubernur
Provinsi Sulawesi Barat
di
tempat

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan, LAN selaku instansi pembina pelatihan ASN memiliki tugas untuk melakukan Akreditasi Lembaga Pelatihan Pemerintah. Akreditasi ini bertujuan untuk memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memberikan saran perbaikan guna peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pelatihan.

Salah satu proses dalam akreditasi adalah Rapat Penilaian Akhir Akreditasi, yang menjadi sarana pengambilan keputusan dari rangkaian proses penilaian. Untuk **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat** telah dilakukan Penilaian Akhir Akreditasi pada tanggal 4 Agustus 2021 dengan hasil sebagaimana terlampir disertai catatan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

Demikian kami sampaikan. Kami sangat mengapresiasi upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan standar penyelenggaraan pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan hasil akreditasi ini kami berharap kualitas penyelenggaraan pelatihan di lingkungan instansi Saudara akan semakin meningkat.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Barat.



**HASIL PENILAIAN
AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN
TAHUN 2021**

- A. Lembaga Pelatihan** : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat
- B. Akreditasi Program** : 1. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas : **81,824 (B)**
2. Pelatihan Dasar CPNS : **81,651 (B)**

C. Catatan Hasil Akreditasi

I. Catatan yang harus dipertahankan

1. Kualitas penyelenggaraan pelatihan sudah baik;
2. Kualitas tenaga pelatihan cukup baik;
3. Kualitas layanan pelatihan sudah baik;
4. Penyelenggaraan pelatihan sudah didukung dengan pola pembiayaan yang baik.

II. Catatan yang harus diperbaiki

1. Perlu peningkatan variasi metode pembelajaran bagi widyaiswara agar pembelajaran Latsar CPNS dan PKP lebih aktif dan interaktif sehingga pelatihan tidak membosankan;
2. Perlu peningkatan frekuensi penyelenggaraan PKP;
3. Perlu memfungsikan dan memaksimalkan peran tim penjaminan mutu dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi dan dilakukan tindak lanjut atas hasil *monitoring* dan evaluasi tersebut. *Monitoring* dan *Evaluasi* menjadi bagian dari penerapan manajemen mutu lembaga pelatihan;
4. Perlu mendorong pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan baik PKP maupun Latsar CPNS;
5. Perlu pengembangan sistem informasi penyelenggaraan pelatihan (*website*, aplikasi pembelajaran, dan *complaint handling*). Sistem informasi ini juga digunakan untuk melakukan diseminasi produk pembelajaran sehingga *stakeholders* eksternal dapat memanfaatkan hasil-hasil pembelajaran, juga untuk evaluasi penyelenggaraan, tenaga pengajar;
6. Mendorong percepatan penerapan e-STTP dalam penerbitan surat keterangan pelatihan;

7. Perlu peningkatan kualitas sarana prasarana misalnya meningkatkan sarana prasarana yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, meningkatkan kebersihan, ketersediaan air bersih di asrama, peningkatan kualitas wifi, peremajaan *furniture, talking wall*, perpustakaan, AC di setiap ruangan, ketersediaan klinik kesehatan dan tenaga medis yang mudah diakses, serta prasarana yang membantu akses bagi difabel.

Jakarta, 4 Agustus 2021
Deputi Bidang Kebijakan
Pengembangan Kompetensi ASN,



Muhammad Taufiq